

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari sebuah pembangunan dalam suatu negara. Karena kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial didalam masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Badan Pusat Statistik (2000) dalam Aljundi (2014), kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah kesejahteraan penduduk, maka menggambarkan semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Masalah kemiskinan akhir-akhir ini masih menjadi permasalahan yang kompleks dalam suatu pembangunan. Artinya permasalahan kemiskinan merupakan masalah pokok sejak dulu hingga sekarang. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

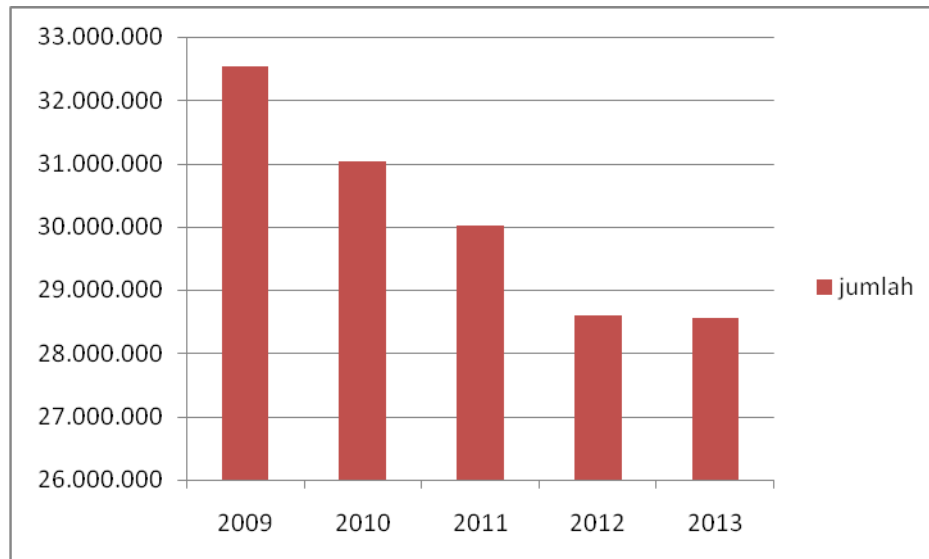
Irawan dan Suparmoko (2002:14) mengemukakan sifat sifat umum negara sedang berkembang mempunyai sifat yang berbeda dengan negara yang relatif sudah berkembang. Sifat sifat tersebut merupakan aspek-aspek khusus dari kemiskinan, terutama sifat sosial ekonomi negara yang sedang berkembang. Keadaan umum di negara sedang berkembang dikemukakan oleh *General Manager dari United Nations Special Fund for Economic Development* tahun 2012 sebagai berikut :

“ Setiap orang dapat mengetahui belum berkembangnya suatu Negara bila ia melihat sendiri keadaan disitu. Keadaannya adalah miskin, banyak pengemis di kota, orang orang hidup pada tingkat subsistence. Tidak banyak terdapat pabrik pabrik karena biasanya kekurangan pasokan (supply) energi dan penerangan. Jalan jalan dan kereta api belum banya, pelayanan pemerintah dan komunikasi kurang baik. Rumah rumah sakit dan lembaga lembaga perguruan tinggi masih jarang, penduduk kebanyakan masih buta huruf. Ada beberapa orang yang kaya dan hidup mewah. Sistem bank tidka baik, pinjaman pinjaman yang kecil jumlahnya berasal dari orang orang yang mempunyai uang,dan ini biasanya bersifat menghisap melalui sistem rente (bunga) yang berat.kegiatan ekspor terutama berupa bahan bahan dasar, biji besi dan kadang kadang sedikit barang mewah. Usaha usaha pertambangan dan pertanian untuk ekspor dilakukan oleh perusahaan asing “

Pada prakteknya Perserikatan Bangsa Bangsa menganggap bahwa suatu negara belum dapat dikatakan berkembang apabila tingkat penghasilan perkapitanya rendah. Kurang lebih 100 negara yang penghasilan perkapitanya kurang dari \$300, dikatakan belum berkembang atau dengan istilah sekarang “sedang berkembang”.

Indonesia yang merupakan salah satu negara sedang berkembang mempunyai jumlah penduduk miskin relatif masih sangat besar. Berdasarkan data dari SUSENAS yang dikeluarkan pada bulan maret 2014

menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya sangat besar seperti yang terlihat pada gambar berikut :



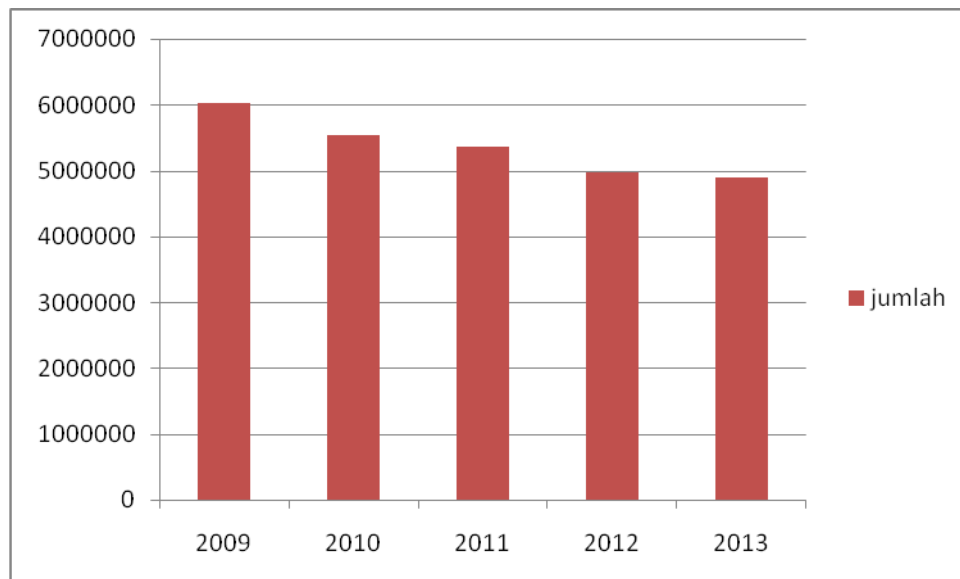
Sumber : SUSENAS,2014

Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan keterangan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tiap tahunnya memang mengalami penurunan, meskipun begitu jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 masih cukup tinggi yaitu sebesar 28.553.930 jiwa. Untuk itu perlu upaya-upaya secara serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat, agar bisa keluar dari masalah kemiskinan. Sehingga harapannya nantinya Indonesia bebas dari masalah kemiskinan seperti yang diharapkan.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan di tingkat negara saja, tetapi pada tingkat paling bawah baik provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Masalah kemiskinan di Jawa timur juga masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga kini. Tercatat pada tahun 2013 jumlah kemiskinan di Jawa Timur sebesar

4.893.010 jiwa. Seperti yang terlihat pada gambar perkembangan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2009 – 2013 berikut :



Sumber : BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 1.2 Perkembangan Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Ribuan Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur perkembangannya memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi jumlahnya masih besar yaitu 4.893.010 jiwa pada tahun 2013. Dengan demikian perlu adanya kerjasama antara pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinan di Jawa Timur. Agar nantinya masalah kemiskinan ini bisa diatasi atau paling tidak bisa di minimalisir jumlahnya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah dan persentase penduduk miskin, dan garis kemiskinan menurut kabupaten/kota, di Jawa Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase	Garis
		Penduduk	Penduduk	Kemiskinan
		Miskin (000)	Miskin	(Rp/Kap/bulan)
3501	Kab. Pacitan	91,7	16,73	215 482
3502	Kab. Ponorogo	103,0	11,92	239 963
3503	Kab. Trenggalek	92,8	13,56	243 665
3504	Kab. Tulungagung	91,7	9,07	269 290
3505	Kab. Blitar	120,3	10,57	236 381
3506	Kab. Kediri	202,7	13,23	245 287
3507	Kab. Malang	288,6	11,48	245 120
3508	Kab. Lumajang	124,4	12,14	228 796
3509	Kab. Jember	278,5	11,68	260 106
3510	Kab. Banyuwangi	152,2	9,61	276 648
3511	Kab. Bondowoso	115,3	15,29	290 792
3512	Kab. Situbondo	90,3	13,65	240 085
3513	Kab. Probolinggo	238,7	21,21	328 407
3514	Kab. Pasuruan	175,7	11,26	274 486
3515	Kab. Sidoarjo	138,2	6,72	329 946
3516	Kab. Mojokerto	116,6	10,99	280 779
3517	Kab. Jombang	137,5	11,17	289 841
3518	Kab. Nganjuk	140,8	13,60	295 806
3519	Kab. Madiun	83,7	12,45	256 567
3520	Kab. Magetan	76,3	12,19	253 040
3521	Kab. Ngawi	127,5	15,45	233 596
3522	Kab. Bojonegoro	196,8	16,02	263 439
3523	Kab. Tuban	196,9	17,23	256 900
3524	Kab. Lamongan	192,0	16,18	279 166
3525	Kab. Gresik	171,6	13,94	331 296
3526	Kab. Bangkalan	218,3	23,23	291 529
3527	Kab. Sampang	248,2	27,08	261 972
3528	Kab. Pamekasan	153,7	18,53	256 586
3529	Kab. Sumenep	225,5	21,22	259 046
3571	Kota Kediri	22,8	8,23	349 925
3572	Kota Blitar	10,1	7,42	304 224
3573	Kota Malang	41,0	4,87	362 162
3574	Kota Probolinggo	19,2	8,55	364 317
3575	Kota Pasuruan	14,6	7,60	316 862
3576	Kota Mojokerto	8,3	6,65	312 919
3577	Kota Madiun	8,7	5,02	320 210
3578	Kota Surabaya	169,4	6,00	372 511
3579	Kota Batu	9,4	4,77	336 844
	JAWA TIMUR	4893,0	12,73	273 758

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi adalah pertama, Kabupaten Sampang yaitu sebesar 27,08% dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang 248.200 jiwa, Kabupaten Bangkalan diurutan kedua yaitu sebesar 23,23% dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan 218.300 jiwa, ketiga Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 21,22% dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep 225.500 jiwa, dan diurutan keempat, Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 18,53% dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan 153.700 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kepulauan Madura masih tergolong daerah yang kemiskinannya cukup tinggi dan perlu dicarikan solusi. Mengingat adanya keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan pendapatan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan buruh di wilayah pesisir daratan Kabupaten Sumenep. Karena berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa informasi yang didapat dilapangan dari responden, mengatakan bahwa pendapatan yang diterima oleh nelayan buruh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh juragan nelayan selaku pemilik modal. Sehingga pendapatan yang diterima oleh nelayan buruh rendah. Selain itu juga didukung pendapat Karim (2003) dalam Ustman (2007) yang mengemukakan bahwa kedudukan nelayan buruh merupakan kelompok yang masuk dalam urutan masyarakat terbawah dalam struktur masyarakat pesisir.

Pendapatan yang rendah mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan. Dimana jika pendapatan seseorang rendah maka akan berpeluang untuk orang tersebut menjadi miskin, begitu juga dengan yang terjadi pada nelayan buruh.

Kaitan antara pendapatan dengan kemiskinan juga bisa dilihat dari penentuan garis kemiskinan yang dilakukan oleh World Bank. Dalam menentukan garis kemiskinan dunia World Bank menggunakan indikator pendapatan yaitu sebesar 1,5 dolar perhari. Dimana jika pendapatan seseorang lebih kecil dari 1,5 dolar perhari, maka orang tersebut di kategorikan miskin.

Pendapatan merupakan aliran dana yang masuk yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi pendapatan di definisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang atau natura yang di peroleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 1992). Sedangkan pendapatan bagi nelayan adalah seluruh hasil penjualan dari hasil tangkapan ikan yang diperolehnya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, pendapatan yang diterima seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang di alami masyarakat nelayan. Pengeluaran yang besar seringkali tidak di imbangi dengan pendapatan yang besar pula, bahkan cenderung kurang. Karena pendapatan nelayan yang rendah inilah, sehingga masyarakat nelayan seringkali di identikkan dengan masyarakat miskin. Seperti yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik tahun 2011 yang mencatat bahwa jumlah nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin Nasional yang mencapai 31,02 juta orang (Robin 2012). Namun, disisi lain Indonesia memiliki

potensi kelautan yang besar, namun Indonesia juga memiliki permasalahan kemiskinan yang begitu familiar dengan kehidupan nelayan. Solicha dalam Bambang (2009) menyatakan bahwa:

“ Kemiskinan yang membelenggu nelayan di negara maritim ini sudah berlangsung lintas generasi dan seakan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan zaman, bahkan pendapatan nelayan Indonesia berada di-bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia yakni sebesar Rp520 ribu per bulan “.

Dari kutipan di atas maka rendahnya pendapatan nelayan merupakan tema yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam. Salah satunya di Pulau Madura.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau di Jawa Timur yang dikelilingi oleh lautan yang luas yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, Pulau Madura masih menjadi pulau yang mempunyai kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Pulau Madura terdiri dari empat Kabupaten, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Dari keempat kabupaten tersebut, Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang secara geografis mempunyai banyak pulau dengan luas perairan $\pm 50.000 \text{ km}^2$ lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti salah satunya Kabupaten Sampang yang secara umum berupa daratan dan hanya mempunyai satu pulau dengan luas perairan $\pm 86 \text{ km}^2$. Selain itu, jika dilihat dari produktivitas perikananannya Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang tingkat produktivitas dari sektor perikannya paling besar jika dibandingkan ketiga kabupaten lainnya yaitu sekitar 40.200 ton. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Data Penangkapan Perikanan di Madura Tahun 2014

No	Kabupaten	Jumlah perikanan (ton)
1	Sumenep	40.200
2	Bangkalan	23.485
3	Pamekasan	20.283
4	Sampang	15.617

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun,2015

Dari data di atas, terlihat bahwa produksi perikanan Kabupaten Sumenep tertinggi yaitu sebesar 40.200 ton. Jika dibandingkan dengan dengan Kabupaten lain seperti Kabupaten Bangkalan yang produktivitas perikanannya sebesar 23.485 ton, Kabupaten Pamekasan yang produktivitas perikanannya sebesar 20.283 ton, dan Kabupaten Sampang yang produktivitas perikanannya sebesar 15.617 ton. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang juga pernah dilakukan oleh Jakfar Sadik di Kabupaten Sumenep dengan judul “Analisis Nilai tukar Nelayan di Kabupaten Sumenep” melalui berbagai analisa dan penghitungan Nilai Tukar Nelayan serta Indeks Nilai Tukar Nelayan terhadap Rumah Tangga secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep yang kemudian analisa dan penghitungan NTN terhadap masing-masing kategori rumah tangga nelayan dari 3 (lima) kategori yaitu rumah tangga nelayan perairan umum, laut lepas, dan budidaya disimpulkan bahwa Kelompok rumah tangga nelayan Kabupaten Sumenep kebanyakan berada dalam lingkaran kemiskinan karena pendapatan yang rendah (<1) sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan standar keluarganya. Hanya kelompok nelayan kapal motor dan budidaya air payau yang

tingkat kehidupannya cukup layak atau memenuhi standart kehidupan keluarganya karena tingkat pendapatannya cukup tinggi (>1).

Dari data dan hasil penemuan di atas, maka masalah rendahnya pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep yang berada di ujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar berjumlah 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002). Sehingga sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumenep berpencaharian sebagai petani dan nelayan. Pertanian yang dikelola masyarakat sebagian besar adalah pertanian subsisten, yaitu hasil dari pertanian lebih digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan primer.

Penduduk di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai petani sawah yang bergantung kepada iklim. Sedangkan komoditas yang dihasilkan adalah jagung, padi, dan tembakau. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, mereka juga bekerja mengikuti keadaan cuaca. Perbedaannya, jika petani sawah bisa dikerjakan oleh lelaki atau wanita, pekerjaan sebagai nelayan hanya dilakukan oleh lelaki saja. Hal ini dikarenakan resiko yang dihadapi tinggi. Hal ini mengandung arti bahwa keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh, hal tersebut bisa jadi merupakan salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat nelayan selama ini.

Pekerjaan sebagai nelayan biasanya terjadi secara struktural, artinya pengetahuan tentang bagaimana bekerja sebagai nelayan biasanya diperoleh

dari nenek moyang mereka secara turun-temurun yang kemudian menjadikannya bekerja sebagai nelayan juga. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya. Sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti dimana perkiraan ikan berada. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya Sebean, (2007) dalam Wasak (2012) menjelaskan rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan laut (*commonproperty*) sebagai faktor produksi, jam kerja harus mengikuti kondisi oseanografis (melaut hanya rata rata sekitar 20 hari dalam satu bulan, sisanya relatif menganggur). Namun disisi lain, masyarakat nelayan juga dikenal memiliki budaya positif yang cukup tinggi serta nilai religius yang bagus dan dijaga dari generasi ke generasi.

Budaya-budaya yang berkembang di masyarakat nelayan tersebut di antaranya seperti budaya sosial yang tinggi, hal itu di buktikan dengan interaksi sosial masyarakat yang bagus seperti gotong royong dan budaya *rokat tase'* yang masih banyak dilakukan di berbagai wilayah pesisir. Budaya *rokat tase'* merupakan budaya yang dilakukan sekali dalam setahun sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan, utamanya dari hasil laut. Budaya positif lainnya yang juga dimiliki masyarakat nelayan adalah masyarakat nelayan dikenal sebagai pribadi yang tangguh, pekerja keras, serta berani. Tentunya hal itu bisa menjadi nilai positif bagi masyarakat nelayan khususnya. Etos kerja masyarakat nelayan yang berfilosofi *abhantal ombha' asapok angen* yang dalam artian adalah bahwa masyarakat nelayan pekerja keras tentunya hal

ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat madura itu sendiri baik terhadap segi sosial maupun ekonomi. Seharusnya dengan budaya-budaya positif tersebut juga mempunyai pengaruh positif pada masyarakat nelayan. Akan tetapi pada kenyataannya, masalah rendahnya pendapatan masyarakat nelayan masih belum terselesaikan sampai saat ini. Tentunya hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ ***Analisis Pendapatan Nelayan Buruh di Kabupaten Sumenep*** “.

Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan buruh di Kabupaten Sumenep dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat nelayan khususnya dalam ekonomi sehari-hari, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Dengan demikian, nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tolak ukur tersebut dilihat dari perekonomian di dalam masyarakat berupa pendapatan melalui beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan nelayan. Sedangkan penentuan variabel yang dijadikan acuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada nelayan buruh yang ditemui di lapangan dan dikaitkan dengan beberapa teori yang mendukung. Seperti teori pendapatan Sukirno dalam Adhar (2013) mengatakan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dari teori ini maka prestasi nelayan buruh dalam periode tertentu bisa diartikan sebagai jumlah jam kerja yang diluangkannya dalam sekali melaut dan pengalaman yang dimilikinya selama berprofesi sebagai nelayan buruh. Case & fair juga menyebutkan bahwa besarnya jumlah produksi salah satunya dipengaruhi oleh modal. Dalam

kaitannya dengan kehidupan nelayan, maka proses produksi bisa diartikan sebagai proses penangkapan ikan, sedangkan modal dalam proses penangkapan tersebut berupa sarana dan prasarana yang digunakan. Berdasarkan keadaan masyarakat nelayan buruh di lapangan dan didukung oleh beberapa teori di atas maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan nelayan buruh, diantaranya adalah variabel jam kerja nelayan, variabel pengalaman kerja, dan variabel sarana dan prasarana.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel jam kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana pengaruh variabel pengalaman kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana pengaruh variabel sarana dan prasarana terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel jam kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pengalaman kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel sarana dan prasarana terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penulis, bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kehidupan masyarakat nelayan dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat nelayan
2. Untuk Pemerintah, sebagai gambaran dalam membuat strategi pembangunan khususnya bagi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Sumenep
3. Untuk Publik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.